



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 633 /SEK/OT.01.1/5/2019
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permintaan Dokumen Data Dukung
Penilaian Mandiri Pembangunan
Zona Integritas

6 Mei 2019

Yth. (Daftar Pejabat Terlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.73/HK.00.01/03/2019 perihal SPPT-TI Sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum maka demi kelancaran proses evaluasi, penyampaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dan pengusulan Pengadilan Negeri pada 12 (dua belas) wilayah prioritas dan mandatori untuk menjadi unit kerja percontohan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan ini meminta Saudara untuk segera menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, dokumen data pendukung Pembangunan ZI sebagaimana berikut:

1. Laporan PMPZI Pengadilan Negeri;
2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja pengadilan;
3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI ;
4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri; dan
5. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat dokumen tersebut akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian, maka batas akhir penyampaiannya adalah pada tanggal 13 Mei 2019.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. YM. Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Kepala Badan Pengawasan.

LAMPIRAN Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 633/SEK/OT.01.1/5/2019
Tanggal : 6 Mei 2019

DAFTAR PEJABAT

1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung
7. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
8. Ketua Pengadilan Negeri Medan
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
10. Ketua Pengadilan Negeri Manado
11. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
12. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
13. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
14. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
15. Ketua Pengadilan Negeri Padang
16. Ketua Pengadilan Negeri Semarang